



**RILIS**

**KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI  
PADA RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2023 – 2024  
KE PROVINSI RIAU  
TANGGAL 22 – 26 APRIL 2024**

Komisi II DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses ke Provinsi Riau pada tanggal 22 April 2024. Kunjungan dipimpin oleh Bapak Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H. selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP dan diikuti oleh beberapa anggota Komisi II DPR RI dari berbagai Fraksi.

Kunker Reses ke Provinsi Riau dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi II DPR RI dengan mengunjungi Mitra Kerja Komisi II DPR yaitu Pj. Gubernur Provinsi Riau Bapak SF Hariyanto beserta jajaran Kajati Provinsi Riau, Kapolda Riau, Ketua KPU Provinsi Riau dan Ketua Bawaslu Riau. Kunjungan tersebut dilaksanakan di Kantor Gubernur Riau dalam rangka evaluasi tahapan Pemilu serentak 2024 dan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.

Hadir pula Kepala Pusat Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri Regional Bukit Tinggi, dan Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI Bapak Eberta. Adapun hasil yang didapatkan dari kunjungan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 berjalan dengan lancar dan antusias dari masyarakat pun cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan partisipatif masyarakat yaitu sebanyak 3.748.930 pemilih atau 77.62 % dari jumlah DPT yang memberikan hak suaranya ke TPS. Jumlah tersebut meningkat 478.400 pemilih dari tahun 2019 yang hanya 3.271.530 pemilih. Jumlah tingkat kehadiran memang tidak terlalu maksimal dikarenakan peristiwa alam hujan deras pada saat pemungutan suara yang melanda hampir di seluruh wilayah Provinsi Riau. Bahkan terjadi banjir di beberapa daerah seperti Kota Pekanbaru, Kab. Indragiri Hulu, Pelalawan, Rokan Hulu, Kampar dan Rokan Hilir.
2. Selama proses Pemilu serentak 2024 Pemprov Riau rajin melaksanakan kordinasi dengan seluruh jajaran Forkopinda Provinsi Riau, KPU Prov. Riau, Bawaslu Prov. Riau Kapolda, Korem TNI Riau, Kajati Riau dan para Akademisi guna memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan tertib.
3. Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 terdapat beberapa persoalan yang terjadi diantaranya adalah kesulitan KPU Riau dalam mencari gudang logistik yang layak sesuai dengan ketentuan KPU RI, Keterlambatan pendistribusian logistik karena lambatnya kedatangan pengiriman dari penyedia dan kurangnya pemahaman penyelenggara di bawah dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.
4. Bawaslu Provinsi Riau merekomendasikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 20 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Provinsi Riau, namun hanya 18

TPS yang dilaksanakan PSU oleh KPU Riau diantaranya di Kota Dumai, Kab. Rokan Hilir, Bengkalis, Meranti, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Pelalawan. Faktor terjadinya PSU antara lain ketidaksesuaian pemilih yang datang dengan DPT yang ada.

5. Ada 11 gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di wilayah Provinsi Riau yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) Gugatan ini terjadi yang dari Caleg semua tingkatan mulai dari pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan DPD RI.
6. KPU Riau telah siap untuk menghadapi dan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2024. Kesiapan ini dibuktikan dengan sudah tersedianya anggaran hibah dari Pemprov Riau. Pemberian hibah tersebut akan diberikan 40 % di tahap pertama dan 60% di tahap kedua. Saat ini KPU sedang melaksanakan tahapan recruitmen badan Ad hoc.
7. Komisi II DPR RI berharap para komisioner KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan recruitmen penyelenggara Ad hoc baik PPK maupun PPS bisa dilaksanakan secara transparan dan selektif. Agar bisa melahirkan para penyelenggara di bawah bisa benar-benar berintegritas dan melaksanakan tugas dengan baik.

Selain melaksanakan pertemuan dengan jajaran Pemprov Riau, rombongan Komisi II DPR RI juga melaksanakan kunjungan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Riau yang bertempat di Ballroom Hotel Pangeran di Jalan Sudirman 371-373 Kota Pekanbaru. Dalam pertemuan tersebut hadir Kepala Kantor Wilayah Provinsi Riau bapak Nurhadi Putra, A.Ptnh., M.M. dan seluruh Kepala Kantor Pertanahan Se Provinsi Riau. Hadir pula Staf Ahli Menteri ATR/BPN RI Bapak Dr. Budi Situmorang, MURP.

Adapun hasil yang pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Luas wilayah di Provinsi Riau adalah 9.294.832,55 Ha, namun luas Area Penggunaan Lain (APL) hanya 3.531.966,96 Ha atau sekitar 37,99% dari total luas Wilayah. Adapun luas APL di dalam Peta Indikatof Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) adalah 396.871,9 Ha. Jadi yang bisa menjadi area kerja kami adalah APL diluar PIPIB yaitu seluas 3.135.095,06 Ha.
2. Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Riau dan seluruh Kantah ATR/BPN Se provinsi Riau sudah berupaya untuk melaksanakan program output utama prioritas Nasional tahun 2023 dan 2024. Namun untuk proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kami hanya dilibatkan dalam proses FGD/Konsultasi Publik/klinik dan Rapat Pembahasan lainnya. Persetujuan substansi dari RDTR merupakan ranah dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas PUPR.
3. Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Riau dan seluruh Kantah di Provinsi Riau membutuhkan fasilitas untuk menunjang kinerja. Diantaranya adalah gedung untuk ketersediaan tempat guna mencukupi kebutuhan arsip yang ada. Begitu juga kebutuhan Rumah Dinas untuk kepala Kantah yang ada di Provinsi Riau. Karena untuk saat ini tidak semua Kepala Kantah memiliki fasilitas Rumah dinas. Dari 12 Kantah yang ada baru tiga yang memiliki fasilitas Rumah dinas. Sedangkan tidak ada anggaran yang tersedia untuk biaya sewa.

4. Terdapat beberapa kendala yang ada dalam pelaksanaan program di Kanwil BPN Provinsi Riau. Kendala yang ada diantaranya terkait dengan pemetaan wilayah, sertifikasi Hak atas Tanah PTSL, pendataan tanah ulayat, SK Distribusi, dan penanganan akses reform. Faktor yang menyebabkan kendala tersebut diantaranya adalah keterbatasannya SDM yang mumpuni di lapangan, kurangnya pemahaman masyarakat dalam bidang pertanahan serta keterbatasan dukungan anggaran yang tersedia.
5. Kanwil ATR/BPN saat ini sedang mempersiapkan pelayanan sertifikat elektronik di seluruh wilayah Provinsi Riau. Program ini akan dimulai terlebih dahulu di Kantah Kota Dumai dan akan berlanjut seluruh Kab/Kota di Provinsi Riau. Namun perlu adanya dukungan anggaran yang memadai dari Kementerian ATR/BPN RI guna memperlancar transformasi dari sertifikat manual ke sertifikat elektronik.
6. Kanwil ATR/BPN Provinsi Riau akan mengakselerasikan sertifikasi seluruh aset milik pemerintah baik Provinsi maupun Kab/kota di seluruh Provinsi Riau. Seluruh proses sertifikasi tersebut ditargetkan selesai di akhir tahun 2025. Maka dari itu diperlukan kerjasama yang baik antara ATR/BPN dengan seluruh stakeholder pemerintahan yang ada.
7. Anggaran di Kementerian ATR/BPN terbatas dan tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan untuk menunjang program yang ada. Maka dari itu perlu adanya skema baru salah satunya dengan membuat aturan baru agar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ada sebagian yang dialokasikan untuk keperluan kerja ATR/BPN. Hal ini bertujuan agar seluruh agenda ATR/BPN bisa terealisasi dengan lancar.
8. Dengan banyaknya persoalan dan kendala yang ada, Komisi II DPR RI merekomendasikan kepada Kanwil ATR/BPN Provinsi Riau untuk memetakan persoalan mana yang menjadi prioritas untuk dikerjakan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan supaya persoalan yang ada bisa terselesaikan satu per satu sehingga bisa terukur tugas mana yang sudah diselesaikan.
9. Komisi II DPR RI akan membawa hasil dari kunjungan kerja ini sebagai bahan rapat kerja dengan Kementerian ATR/BPN dan lembaga lain yang terkait. Semua persoalan yang ada di ATR/BPN segera mungkin dicarikan solusi yang baik. Agar program reforma agraria yang menjadi program nasional pemerintah bisa berjalan dengan baik.

Terakhir sebagai penutup Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bapak Junimart Girsang mendorong kepada Kementerian ATR/BPN di seluruh tingkatan agar bisa bekerja sesuai dengan norma hukum yang ada. Hal ini bertujuan agar Bapak/Ibu birokrat yang ada bisa bekerja dengan tenang dan aman tanpa adanya persoalan dikemudian hari. Komisi II DPR RI sangat berharap bahwa program strategis Kementerian ATR/BPN yang tertuang dalam Reforma Agraria bisa memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Pekanbaru, 22 April 2024,  
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Riau.